

BAB V

KESIMPULAN

Perbatasan Indonesia-Australia merupakan batas maritime yang terpanjang yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu meliputi seluruh batas maritime di bagian selatan Indonesia, benua Australia, dan wilayah Indonesia bagian Timur. Banyaknya sumberdaya perikanan di wilayah tersebut menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, namun pihak-pihak tersebut dalam mencari keuntungan mereka tidak lagi mengindahkan peraturan penangkapan ikan yang ada sehingga marak terjadi kegiatan praktik *illegal fishing*. Menanggapi masalah *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, khususnya di samudera Hindia. Kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam memberantas *illegal fishing* yang dilakukan kapal-kapal asing di wilayah tersebut. Indonesia dan Australia sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi menteri mengenai *illegal fishing* di wilayah tersebut.

Selain implikasi pada aspek ekonomi, efek langsung dari praktik penangkapan ikan ilegal akan berdampak pada aspek sosial dan lingkungan. Namun, diantara aspek-aspek tersebut, aspek ekonomi merupakan yang terkena imbas negatif paling besar akibat praktik penangkapan ikan ilegal, karena penangkapan ikan ilegal merupakan bagian awal dari usaha perikanan yang sifatnya juga *ilegal*. Pada akhirnya, praktik penangkapan ikan akan mengancam

pembangunan ekonomi suatu negara dan *food security* yang diperuntukkan bagi rakyat.

Menanggapi masalah *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Australia, khususnya di samudera Hindia. "illegal fishing" adalah masalah yang bukan hanya dihadapi Australia tetapi juga Indonesia. Cara efektif untuk mengatasi persoalan itu adalah kerjasama internasional. Pencurian ikan adalah masalah internasional yang telah mengancam stok ikan dunia, lingkungan bahari dan keamanan perbatasan semua negara di kawasan. Kedua negara sepakat untuk bekerjasama dalam memberantas *illegal fishing* yang dilakukan kapal-kapal asing di wilayah tersebut. Indonesia dan Australia sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi menteri mengenai *illegal fishing* di wilayah tersebut. Dalam menghadapi tantangan yang serupa dalam hal *illegal fishing* yang dilakukan kapal asing, melalui kerjasama internasional diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan jauh lebih efektif. Kerjasama antara Indonesia-Australia tertuang dalam *agreement of the republic of Indonesia and the Government of Australian Relation Cooperation in Fisheries* yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari kedua negara.

Bagi kasus pencurian ikan oleh negara ketiga, Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan koordinasi patroli, pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan dan monitoring bersama. Para pelaku penangkapan ikan ilegal yang banyak dilakukan oleh negara ketiga akan ditindak tegas, dan di wilayah Australia banyak dilakukan penenggelaman. Sementara untuk nelayan yang melanggar perbatasan karena ketidaktahuan atau kemiskinan, Indonesia dan

Australia melakukan langkah-langkah persuatif yang disebut "*Public Information Campaign*" atau sosialisasi pencegahan *illegal fishing*.

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi *Illegal Fishing* Dengan Australia yaitu dengan mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran di kalangan nelayan. Dengan adanya kerjasama penyuluhan kedua negara dan dengan pendekatan yang komprehensif, dan menyediakan informasi publik untuk mendidik para nelayan tentang konsekuensi hukum dari melakukan pencurian ikan, pentingnya kelestarian lingkungan dan alternatif mata pencaharian selain melaut bagi nelayan diharapkan dapat mengurangi *illegal fishing* di perbatasan laut Indonesia-Australia.

Upaya Kerjasama antara Indonesia-Australia terjalin melalui kerjasama melalui pembentukan forum kerjasama. Indonesia dan Australia juga telah menjalin kesepakatan lainnya berupa pembentukan sebuah forum pengawasan bersama untuk meningkatkan pertukaran informasi mengenai pergerakan kapal penangkap ikan yang terindikasi melakukan praktek *illegal fishing*. Kesepakatan tersebut merupakan kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Australian Customs Services.

Kerjasama lainnya adalah melalui patroli bersama dengan tujuan dinamis patroli yang dikoordinasi bersama ini adalah untuk meningkatkan jumlah operasi tiap tahun dan untuk membangun database pengawasan kawasan yang dapat berfungsi sebagai tulang punggung pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perikanan terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan secara gelap, tidak berizin atau tanpa laporan. Dengan adanya kerjasama patroli bersama kepentingan Indonesia

adalah kerjasama tersebut dapat menutupi beberapa kelemahan yang memberi peluang terjadinya *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Di antaranya rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini. Terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut memberi pengaruh terhadap kinerja petugas di lapangan.